

PANCASILA (PAKET 5) [TWK]

Kelas : UMUM, Mata Pelajaran : CPNS-TWK

A. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai ...
 - A. Kewenangan daerah
 - B. Pemerintah daerah
 - C. Otonomi daerah
 - D. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah ...
 - A. Pemerintah pusat kepada pemerintah asing
 - B. Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
 - C. Pemerintah asing kepada pemerintah daerah
 - D. Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
3. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan ...
 - A. Modernisasi dalam suatu negara
 - B. Anarki dalam suatu negara
 - C. Sosialisasi dalam suatu negara
 - D. Demokrasi dalam suatu negara
4. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain ...
 - A. Memberikan opini, pendapat atau masukan kepada pemerintah
 - B. Menulis surat kepada wakil rakyat
 - C. Ikut berdemokrasi
 - D. Memberi kesaksian dalam dengan pendapat publik
5. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk ...
 - A. Peraturan otonomi
 - B. Peraturan adat daerah
 - C. Peraturan bersama
 - D. Peraturan perundangan-undangan
6. Berikut ini merupakan contoh partisipasi warga negara dalam bidang politik, yaitu ...
 - A. Membangun jalan tol
 - B. Beramai-ramai membangun rumah mewah
 - C. Memilih pemimpin perusahaan
 - D. Mengikuti pemilihan umum
7. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ...
 - A. Presiden bersama DPR
 - B. Pemerintah Asing
 - C. Pemerintah pusat
 - D. Masyarakat setempat
8. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah ...

- A. Pelaksanaan kegiatan moneter B. Menetapkan kebijakan moneter C. Penataan tata ruang kota D. Eksploitasi kekayaan hutan

9. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah disebut asas ...

- A. Desentralisasi B. Dekonsentrasi C. Perbantuan D. Sentralisasi

10. Pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimaksudkan agar ...

- A. Bangsa Indonesia memiliki calon pemimpin handal di masa depan
B. Dapat menurunkan tingkat kriminalitas di kota dan desa
C. Dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan ketentraman hidup
D. Pembangunan yang kita rencanakan dapat terlaksana lebih cepat

11. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ...

- A. Pasal 19 B. Pasal 20 C. Pasal 17 D. Pasal 18

12. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah...

- A. Daerah B. Kewenangan daerah C. Otonomi daerah D. Daerah otonomi

13. Berikut ini merupakan akibat yang timbul jika terjadi suatu ketidakadilan dalam masyarakat, kecuali ...

- A. Menambah fakir miskin dan anak terlantar
B. Menurunnya tingkat kriminalitas
C. Sulit mewujudkan kesejahteraan bersama
D. Membatasi persediaan kebutuhan pokok rakyat

14. Undang-undang yang mengatur pemerintah Daerah, yaitu ...

- A. Undang-undang No. 31 Tahun 2004
B. Undang-undang No. 32 Tahun 2004
C. Undang-undang No. 33 Tahun 2004
D. Undang-undang No. 34 Tahun 2004

15. Gotong royong memiliki manfaat seperti berikut, kecuali ...

- A. Meringankan beban, waktu, dan biaya
B. Menambah beban negara
C. Menambah sikap solidaritas serta menumbuhkan rasa kekeluargaan
D. Mempertinggi ketahanan bersama

KUNCI JAWABAN DAN PENJELASAN

PANCASILA (PAKET 5) [TWK]

Kelas : UMUM, Mata Pelajaran : CPNS-TWK

A. Pilihan Ganda

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai ...

Jawaban yang benar D

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah ...

Jawaban yang benar D

Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

3. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan ...

Jawaban yang benar D

Demokrasi dalam suatu negara

4. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain ...

Jawaban yang benar A

Memberikan opini, pendapat atau masukan kepada pemerintah

5. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk ...

Jawaban yang benar D

Peraturan perundangan-undangan

6. Berikut ini merupakan contoh partisipasi warga negara dalam bidang politik, yaitu ...

Jawaban yang benar D

Mengikuti pemilihan umum

7. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ...

Jawaban yang benar D

Masyarakat setempat

8. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah ...

Jawaban yang benar B

Menetapkan kebijakan moneter

9. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah disebut asas ...

Jawaban yang benar A

Desentralisasi

10. Pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimaksudkan agar ...

Jawaban yang benar C

Dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan ketentraman hidup

11. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ...

Jawaban yang benar D

Pasal 18

12. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah...

Jawaban yang benar D

Daerah otonomi

13. Berikut ini merupakan akibat yang timbul jika terjadi suatu ketidakadilan dalam masyarakat, kecuali ...

Jawaban yang benar B

Menurunnya tingkat kriminalitas

14. Undang-undang yang mengatur pemerintah Daerah, yaitu ...

Jawaban yang benar B

Undang-undang No. 32 Tahun 2004

15. Gotong royong memiliki manfaat seperti berikut, kecuali ...

Jawaban yang benar B

Menambah beban negara

SoalOnline